

Jumlah Desa Mandiri Meningkat

SOLO (KR) - Jumlah Desa Mandiri terus meningkat, dari 313 pada 2018 menjadi 11.456 desa pada 2023. Meskipun menunjukkan kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Direktur PDRD), Sandy Firdaus mencontohkan seperti pemanfaatan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang belum optimal. Selain itu struktur belanja daerah yang belum memuaskan, local tax ratio masih cukup rendah, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas, sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal.

"UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan," jelas Sandy pada Seminar Akselerasi Implementasi UU HKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Solo (UNS), Selasa (10/10). UU HKPD, lanjutnya, juga untuk menjawab tantangan-tantangan melalui ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan Local Taxing Power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dan perbaikan layanan publik daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pembangunan di desa. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut PAD meningkat, meskipun TKD masih dominan sebagai sumber utama pendapatan APBD. Dengan adanya implementasi UU HKPD ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali PAD. (Qom)-f

DILANTIK JADI BUPATI PEMALANG Mansur Diminta Selesaikan Persoalan Daerah



KR-Budiono

Pelantikan Bupati Pemalang.

SEMARANG (KR) - Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana melantik Mansur Hidayat menjadi Bupati Pemalang, menggantikan Mukti Agung Wibowo yang tersandung kasus hukum. Pelantikan dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang Senin (9/10).

Dalam arahnya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana minta kepada Bupati Mansur Hidayat untuk segera menyelesaikan persoalan daerah yang menjadi pekerjaan rumah di Pemalang. Pelantikan Mansur sebagai Bupati Pemalang definitif, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Pemalang.

Menurut Nana, masih banyak persoalan di Pemalang yang membutuhkan penanganan cepat, diantaranya problem anak putus sekolah, stunting, inflasi, dan kekeringan. "Saya sampaikan saat ini masih kekeringan, banyak terjadi kasus kebakaran. Masyarakat perlu diberikan imbauan-imbauan dan sosialisasi," ujar Nana Sudjana.

Selain itu, lanjut Nana, persoalan seperti stunting anak putus sekolah, inflasi juga harus diatasi. Pemkab Pemalang harus bekerja keras untuk menurunkan inflasi, stunting, dan angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif, dan fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Meski demikian Nana mengakui banyaknya persoalan di Pemalang tidak mungkin bisa diselesaikan seorang diri. Untuk itu Mansur Hidayat selaku Bupati juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Bupati harus bisa berkolaborasi dengan Forkopimda seperti Dandim, Kapolres, Kajari, bahkan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini harus menjadi satu kesatuan. Semuanya fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat," tegas Nana Sudjana. (Bdi)-f

Biografi Jokowi Sebagai Tokoh Inspiratif Dunia Beredar di Korea

SEMARANG (KR) - Buku biografi "Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia" karya Darmawan Prasodjo dirilis dalam versi Bahasa Korea. Peluncuran buku dilakukan dalam acara Festival Indonesia pada Jumat (29/9) lalu di Gwanghwamun Plaza, Seoul, Korea Selatan. Joko Widodo, telah menjadi sosok inspiratif bagi para pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Darmawan bahkan meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penulis buku pertama dan terlengkap tentang Presiden Indonesia dalam Bahasa Korea.

"Hari ini kita meluncurkan Buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia versi Korea karya salah satu anak bangsa, Pak Darmawan Prasodjo. Saya mendorong beliau untuk membuat versi Bahasa Korea, karena memang banyak orang di Korea sangat terinspirasi oleh karakter dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi," ucap Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistyanto.

Dalam biografi, Darmawan membeberkan narasi historis karakter serta visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia dari seluruh rakyat dan membangunnya dalam sebuah kebijakan. Buku ini juga merangkum capaian-capaian Jokowi dalam membangun Indonesia di berbagai bidang, mulai dari membangun pemerataan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pembangunan ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur yang menghubungkan jalan-jalan utama di berbagai provinsi yang mampu membangun kesejahteraan. Setelah kini menjadi Direktur Utama PLN pun, Darmawan semakin menilik perkembangan ekonomi dari infrastruktur yang dibangun pada masa Pemerintahan Jokowi begitu membawa banyak multiplier effect. (Cha)-f

Public Hearing Penyusunan Raperda Hak Keuangan Anggota DPRD Grobogan



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Pemkab Grobogan mengadakan rapat dengar pendapat (public hearing) dalam rangka menyerap aspirasi guna penyusunan draf Raperda Perubahan atas Perda Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Grobogan. Menurut Mokamat, public hearing guna membahas terkait Perubahan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Grobogan tersebut dilandasi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017.

"Setelah adanya PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Perda Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Grobogan juga harus dirubah. Oleh karena itu, untuk menyusun draf raperda dimaksud kita mengadakan public hearing menyerap aspirasi dari mereka," terang Mokamat.

Setidaknya akan ada 10 perubahan serta penambahan aturan dalam pembahasan Raperda tersebut. Di antaranya Pasal 1 di antara rincian angka 16 dan 17 disipkan satu angka yakni angka 16-a, berbunyi kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Ketentuan ayat 2 huruf b Pasal 9 diubah dari Kendaraan Dinas Jabatan menjadi Kendaraan Perorangan Di-

nas. Ketentuan Pasal 13 juga diubah menjadi ayat (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan peorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemakaian rumah negara dan perleengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemda sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. (Tas)-f

Ketentuan ayat 2 huruf b Pasal 9 diubah dari Kendaraan Dinas Jabatan menjadi Kendaraan Perorangan Di-

nas. Ketentuan Pasal 13 juga diubah menjadi ayat (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan peorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemakaian rumah negara dan perleengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemda sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. (Tas)-f



KR-M Taslim

Rapat public hearing penyusunan draf raperda perubahan tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Grobogan.

Usaha Pencucian Pasir Diminta Tak Cemari Irigasi

KLATEN (KR) - Komisi I DPRD Kabupaten Klaten meminta pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah pencemaran limbah pencucian pasir di Desa Prawatan Jogonalan.

Limbah tersebut telah mencemari irigasi dan berdampak pada sekitar 80 hektar lahan pertanian di Desa Bakung serta Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Klaten Eko Prasetyo dalam rapat perdana pembahasan Raperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Klaten, Senin (9/10). "Kami menerima aduan dari para petani di Desa Bakung dan Desa Gondangan Kecamatan Jo-

gonalan Klaten, karena sekitar 80 hektar lahan sawah mereka terdampak," kata Eko Prasetyo.

Eko Prasetyo menjelaskan, masyarakat petani yang tergabung dalam Gapoktan Desa Bakung dan Desa Gondangan, saluran irigasinya terganggu limbah kegiatan cuci pasir yang ada di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan. Luas lahan yang terimbas kegiatan tersebut sekitar 80 hektare, berada di dua desa.

"Teman-teman petani ini berkirir surat, dan tugas kita sebagai penyambung aspirasi masya-

rakat sudah kita sampaikan. Harapan kita ada win-win solution. Kita tak ingin kegiatan ekonomi itu dipangkas langsung, tetapi juga jangan atas nama kegiatan usaha kemudian dampaknya merugikan petani. Pemerintah kita sekarang sedang gencar bicara kedaulatan pangan. Dampak pada petani ini akan sangat mengganggu. Hari ini tadi Kades mengumpulkan Gapoktan dan pengelola usaha," kata Eko Prasetyo.

Terkait dengan pembahasan Raperda, Eko Prasetyo menjelaskan, salah satu hal penting adalah, investor yang masuk Klaten harus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ia berharap dengan aturan

baru nanti iklim investasi di Klaten akan meningkat. "Ini nanti akan kita kejar kalau memungkinkan muatan lokal akan kita sampaikan, bagaimana investor ini bisa menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagainya. Ini akan kita rumuskan nanti di Pansus," jelas Eko pula.

Purwanto Agus, Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPSTP mengemukakan, izin terkait usaha pertambangan yang berdampak pada lahan pertanian di Desa Bakung dan Gondangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan pengecekan. (Sit)-f

Gugatan Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Menang di PTUN

WONOGIRI (KR) - Empat perangkat desa (Perdes) di Kabupaten Wonogiri dimenangkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Menyusul vonis tersebut kini mereka mendesak kepala desa setempat untuk mengangkatnya

kembali menjadi perangkat desa setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya.

Keempat perdes yang menang di PTUN Semarang masing-masing Sukarno (Kasi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo), Suseno (Kadus Tlising Desa Sumberharjo

Eromoko), Riyanto (Kasi Umum dan Perencanaan Desa Pucung Eromoko) dan Loso (Kadus Brengkut Desa Pucung Eromoko). Menurut Sukatno, ia bersama tiga Perdes lainnya di kabupaten itu melakukan gugatan ke PTUN usai mereka dicopot dari jabatannya. "Saya sebagai perangkat desa dicopot oleh Kepala Desa Mlokomanis Wetan pada tahun 2022 lalu," ujar Sukarno kepada KR, Senin (9/10).

Dalam putusan PTUN Semarang Nomor 53/G/2022/PTUN.SMG tanggal 2 November 2022 dan dikeluarkan tanggal 3 Januari 2023 menyatakan mengabulkan gugatan penggugat atas nama Sukatno. Majelis hakim PTUN membatalkan keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian de-

ngan hormat atas nama Sukatno dari jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan karena masa jabatan 20 tahun telah berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali penggugat sebagai perangkat desa.

"Putusan PTUN jelas mewajibkan tergugat yakni Kepala Desa Mlokomanis Wetan untuk mencabut putusannya Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat atas nama Sukatno dari jabatan kepala seksi (kasi) pelayanan desa karena masa jabatan 20 tahun telah berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan tergugat mener-

bitkan keputusan pengangkatan kembali penggugat sebagai perangkat desa," katanya.

Sementara itu, Riyanto berharap Kepala Desa Pucung melaksanakan keputusan PTUN dengan menerbitkan surat pengangkatan kembali. "Tidak menggantungkan keputusan PTUN seperti ini, kalau memang tidak diangkat kembali kami akan mencari pekerjaan sambil lain untuk membiayai hidup keluarga," ungkap Riyanto.

Disampaikan dulu ada perodesasi masa jabatan 20 tahun lalu ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa untuk perodesasi itu sudah gugur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 harusnya sampai umur 60 tahun. (Dsh)-f



KR-Djoko Santoso

Tiga dari empat Perdes di Wonogiri yang dimenangkan PTUN Semarang.

Sido Muncul Gandeng Putri Ariani Jadi Bintang Iklan Tolak Angin

SEMARANG (KR) - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (PT Sido Muncul) menggandeng tokoh muda berprestasi Putri Ariani, aktris Aurelie Moeremans, dan pengusaha muda Veronica Tan. Sido Muncul berharap kerjasama dengan tiga artis ini bisa mewakili dari kalangan anak muda. Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat kepada wartawan melalui seluruh Daring, Senin (9/10) mengatakan tiga wanita berprestasi tersebut menjadi brand ambassador Sido Muncul dalam produksi iklan Tolak Angin terbarunya.

Putri Ariani penyandang tunanetra ini dikenal sebagai penyanyi yang mampu menembus dunia internasional melalui prestasinya karena mampu menjuarai Indonesia's Got

Talent 2014 dan menjadi finalis America's Got Talent musim ke-18 pada 2023. Sedangkan Aktris Aurelie Moeremans makin terkenal setelah membawakan lagu 'Cikini Gondangia' di acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023, dan Veronica Tan merupakan sosok pengusaha muda yang aktif di kegiatan sosial.

Irwan Hidayat mengatakan, iklan terbaru Tolak Angin mengambil tema wanita Indonesia yang kreatif dan pantang menyerah. Melalui brand ambassador yang terpilih ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang, sekaligus mendorong brand awareness bagi produk Tolak Angin. "Ini merupakan iklan baru, bukan menggantikan iklan lama. Temanya

wanita Indonesia yang kreatif dan berprestasi, pantang menyerah, dengan harapan setelah tayang nanti bisa menginspirasi banyak orang," tutur Irwan Hidayat.

Menurut Irwan, produksi iklan baru Tolak Angin memiliki tujuan supaya menampilkan sesuatu yang baru, khususnya bagi anak-anak muda. Apalagi brand ambassador yang dipilih telah mewakili generasi Z yang kini menjadi pasar potensial yang dibidik produk Tolak Angin. Untuk iklan terbaru ini, brand ambassador dikontrak selama satu tahun. Tapi untuk iklan yang sebelumnya dibintangi Reynald Kasali dan Andi F Noya masih tetap jalan.

Irwan mengaku untuk bisa menjadi bintang iklan Tolak Angin harus melalui

proses survei dan seleksi. Syarat yang terpenting, bintang iklan tersebut sebelumnya sudah pernah mengonsumsi Tolak Angin. "Untuk memilih brand ambassador itu di survei dulu, apakah dia selama ini pernah minum Tolak Angin apa tidak," ujarnya.

Aurelie Moeremans mengaku sangat surprise dan bangga digaet menjadi bintang iklan Sido Muncul. Ia mengaku beruntung bisa dipercaya Sido Muncul bersama wanita hebat lainnya untuk menjadi bintang iklanya. (Bdi)-f



KR-Budiono

Para bintang iklan Tolak Angin yang baru, dari kiri, Aurelie Moeremans, Veronica Tan, Putri Ariani, dan Maria Hidayat.